

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK PADA
ANGKUTAN UMUM DI KOTA SEMARANG
(STUDI KASUS PADA ANGKUTAN UMUM
DI TERMINAL PENGGARON)**

Oleh :

Ayu Andriani Simaibang, Kismartini

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http:// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah Kota Semarang memberlakukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan menerbitkan Perda No 3 Tahun 2013. Masih banyak pelanggaran yang terjadi pada angkutan umum Terminal Penggaron menjadi latarbelakang dilakukannya penelitian ini. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis proses implementasi KTR pada angkutan umum di Terminal Penggaron dan faktor pendukung dan penghambat implementasi kemudian berdasarkan itu dapat dirumuskan upaya-upaya yang perlu dilakukan agar implementasi berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan KTR di angkutan umum Terminal Penggaron belum sesuai Perda No 3 Tahun 2013. Hal ini terjadi karena kekurangan dari segi dana, informasi, koordinasi, pemahaman dan komitmen pelaksana kebijakan serta pengaruh lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan kekurangan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya mulai dari pemberian sosialisasi yang tepat, transparansi dana dan media komunikasi masyarakat dengan pelaksana kebijakan agar implementasi berjalan efektif sesuai dengan Perda Kota Semarang No 3 Tahun 2013.

Kata Kunci : Angkutan umum, Implementasi, Kawasan Tanpa Rokok

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok tertinggi di ASEAN dengan persentasi sebanyak 46,16 %. (tempo,2012). Banyaknya perokok di Indonesia berdampak pada pendapatan negara dari industri rokok sebesar 117,15 triliun pada tahun 2014 berdasarkan Kanwil Bea Cukai. Dilain sisi, hal ini kemudian memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Riskesdes 2013 menyebutkan Jawa Tengah sebagai estimasi jumlah penderita kanker sebanyak 68.638 orang yang sebagian besar adalah kanker paru-paru. Untuk menyeimbangkan hal tersebut, pemerintah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Kota Semarang menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan menerbitkan Perda Kota Semarang No 3 Tahun 2013. Penelitian yang dilakukan menfokuskan pada angkutan umum yang sering diakses oleh masyarakat setiap hari. Terminal Penggaron Kota Semarang adalah Terminal Kelas B yang merupakan tempat transit bus

ekonomi non-AC yang beroperasi di dalam Kota Semarang dan pedesaan.

Proses implementasi Kawasan TAnpa Rokok pada angkutan umum di Terminal Penggaron ternyata belum sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Masih ada ditemukan penumpang dan supir yang merokok di angkutan umum dan tidak semua angkutan umum menempel pemberitahuan Kawasan Tanpa Rokok dan larangan merokok menjadi latarbelakng dilakukannya penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada angkutan umum di Terminal Penggaron?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan KTR pada angkutan umum di Terminal Penggaron?
3. Upaya apa yang perlu dilakukan dalam rangka Implementasi KTR pada angkutan umum di Terminal Penggaron?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi penyelenggaraan KTR pada

angkutan umum di Terminal Penggaron.

2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi KTR pada angkutan umum di Terminal Penggaron.
3. Merumuskan upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka implementasi KTR pada angkutan umum di Terminal Penggaron.

D. Kerangka Teori

Mazmanian dan Sabatier dalam Ismail (2009:131) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, perintah-perintah atau keputusan-keputusan oleh badan eksekutif yang penting atau keputusan Badan Penelitian.

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Solichin mengemukakan pengertian implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Berdasarkan definisi yang disebutkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses bagaimana menstranformasikan input (tujuan dan isi kebijakan) ke dalam bentuk rangkaian tindakan operasional guna mewujudkan hasil yang diinginkan dari kebijakan tersebut.

Dalam implementasi tersebut terdapat proses yang sangat kompleks dan panjang yang bermula dari penetapan kebijakan yang disertai dengan payung hukum yang sah kemudian dilaksanakan melalui tahapan implementasi dengan serangkaian kegiatan yang melibatkan banyak aktor kemudian dari kegiatan itu akan mewujudkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Tahapan implementasi akan menempatkan kebijakan dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut. Faktor yang dimaksud adalah segala aspek yang sangat

berpengaruh yang akan menentukan kinerja implementasi kebijakan.

Van Meter dan Van Horn dalam Indiahono (2009) memberikan suatu pendekatan yang menghubungkan kebijakan dengan kinerja implementasi kebijakan dengan dipisahkan oleh variabel bebas yang saling berkaitan. Variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi tersebut yaitu:

1. Standard dan sasaran kebijakan

Kinerja kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang ada di level pelaksana kebijakan melalui penetapan standard an sasaran yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan

2. Sumber Daya

Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan pekerja yang diinginkan. Kemudian dalam memperlancar administrasi suatu kebijakan membutuhkan dana untuk menghasilkan keberhasilan kinerja implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Badan Pelaksana

Implementasi kebijakan ditentukan oleh ciri yang tepat dan cocok dengan badan pelaksana kebijakan kemudian cakupan dan luas wilayah akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan oleh badan pelaksana.

4. Komunikasi antar Organisasi dan Pelaksanaan Kebijakan

Agar berjalan dengan efektif, informasi yang diberikan kepada pelaksana kebijakan harus jelas, konsisten dan seragam. Setelah itu, dalam pelaksanaannya dilakukan koordinasi antar pihak terkait sehingga kesalahan akan semakin kecil terjadi.

5. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana menentukan kemauan untuk melaksanakan kebijakan. Kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh pemahaman akan kebijakan. Ketika pelaksana kebijakan paham akan apa yang harus dilakukan akan menumbuhkan

komitmen untuk mengefektifkan proses kebijakan tersebut.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Dalam menilai kinerja implementasi perlu diperhatikan sejauh mana lingkungan eksternal (sosial, ekonomi, politik) turut mendorong atau menghambat implementasi suatu kebijakan.

Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu mengenai implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok pada angkutan umum di Terminal Penggaron yang dilihat dari proses implementasi sebagai berikut:

1. Sosialisasi KTR di angkutan umum
2. Pemasangan tanda KTR dan larangan merokok di angkutan umum
3. Petugas pengawasan dan pemantau KTR di angkutan umum
4. Inspeksi mendadak terkait pelaksanaan KTR di angkutan umum
5. Teguran yang dilakukan supir dan kernet jika ada pelanggaran

6. Penerapan sanksi bagi pelanggar

7. Pelaporan implementasi KTR di angkutan umum.

Proses implementasi kebijakan tersebut akan menghasilkan kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan akan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

1. Sumber daya yang terdiri dari a) kuantitas dan kualitas pelaksana kebijakan dan b) Kecukupan dana
2. Karakteristik badan pelaksana yang terdiri dari a) Rentang dan derajat pengendalian b) Derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi.
3. Komunikasi antar organisasi dan pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari a) Kejelasan, konsistensi dan keseragaman informasi dan b) Koordinasi antar lembaga.
4. Sikap pelaksana yang terdiri dari a) Pemahaman terhadap kebijakan dan b) Komitmen pelaksana kebijakan.
5. Lingkungan sosial dan ekonomi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan

desain penelitian deskriptif . Penelitian dilakukan pada angkutan umum di Terminal Penggaron. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive dengan orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan diteliti kemudian dilakukan teknik snowball karena penulis ingin menjelajahi objek penelitian. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder yaitu Perda Kota Semarang No 3 Tahun 2013. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi ke Terminal Penggaron yang disertai dengan dokumen kemudian dilakukan wawancara dengan informan. Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2009:246-253), yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi/ penyimpulan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan untuk menganalisis implementasi kawasan Tanpa Rokok(KTR) pada angkutan umum di Terminal penggaron dan

faktor pendukung serta penghambat implementasi sehingga dapat dirumuskan upaya yang perlu dilakukan sehingga kebijakan Kawasan Tanpa Rokok berjalan efektif sesuai Perda Kota Semarang No 3 Tahun 2013.

A. Implementasi KTR pada angkutan umum di Terminal Penggaron

Implementasi KTR pada angkutan umum di Terminal Penggaron dipaparkan melalui hal yang terkait proses implemtasi sebagai berikut:

1. Sosialisasi KTR

Sosialisasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok pada angkutan umum di Terminal Penggaron sudah dilaksanakan sekali pada tahun 2013 bersama dengan Dinas Kesehatan dan Badan Lingkungan Hidup tetapi tidak menjangkau seluruh supir dan kernet angkutan umum sehingga tidak semua paham akan pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. Pemasangan tanda KTR dan larangan merokok

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemberian stiker tanda KTR dan larangan merokok

tidak dilakukan secara menyeluruh kepada supir dan kernet angkutan. Supir yang tidak ikut dalam sosialisasi tahap pertama tidak mendapat stiker pemberitahuan KTR dan larangan merokok sehingga tidak semua angkutan umum ditempel dengan stiker tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 8 Perda Kota Semarang No 3 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa tempat yang dinyatakan sebagai KTR wajib dipasang pengumuman tanda larangan.

3. Petugas pengawasan dan pemantau KTR

Untuk dapat mengefektifkan implementasi KTR pada angkutan umum di Terminal Penggaron harus ada petugas yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan. Implementasi KTR pada angkutan umum diawasi langsung oleh semua staff yang ada di UPTD Terminal Penggaron beserta dengan supir dan kernet angkutan umum.

4. Inspeksi mendadak terkait pelaksanaan KTR

Inspeksi mendadak merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan secara insidental sesuai

dengan Pasal 16 Perda Kota Semarang No 3 Tahun 2013. Inspeksi mendadak dilakukan sekali pada tahun 2014 oleh SATPOL PP beserta dengan DISHUBKOMINFO Kota Semarang. Kegiatan yang dilakukan setiap tahun ini hanya berjalan pada tahun 2014 dan tidak dilanjutkan pada tahun 2015.

5. Teguran yang dilakukan supir dan kernet jika ada pelanggaran

Sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan, supir dan kernet bertanggungjawab untuk memberikan teguran jika terjadi pelanggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran sebagian besar dilakukan oleh supir dan kernet sehingga Pasal 16 Perda Kota Semarang No 3 Tahun 2013 yang mewajibkan larangan dalam bentuk himbuan dan teguran tidak berjalan efektif.

6. Penerapan sanksi bagi pelanggar

Sanksi yang diberikan sesuai Pasal 33 Perda Kota Semarang No 3 Tahun 2013 yaitu ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000. Pemahaman supir dan

kernet yang kurang akan kebijakan ini menyebabkan mereka tidak mengetahui akan adanya sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar.

7. Pelaporan implementasi KTR

Pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada Perda Kota Semarang Pasal 25 yaitu pelaporan rutin setiap tahun yang diserahkan kepada Tim Supervisi. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa belum ada pelaporan yang diberikan oleh UPTD Terminal Penggaron kepada DISHUBKOMINFO terkait pelaporan pelaksanaan KTR pada angkutan umum di Terminal penggaron. Pelaksanaan KTR tidak berjalan efektif karena tidak diketahui permasalahan dan kendala dalam pelaksanaannya. Laporan tersebut seharusnya menjadi evaluasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan KTR.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Implementasi KTR pada angkutan umum di Terminal Penggaron dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat yaitu:

1. Sumber Daya

Pertama, kuantitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan KTR pada angkutan umum sangat memadai karena seluruh staff UPTD Terminal Penggaron dan supir bertindak sebagai pelaksana sekaligus pengawas kebijakan. Semua staff juga sangat memadai dalam hal kompetensi karena dipilih melalui tes dengan kualifikasi tertentu yang menjadi faktor pendukung untuk dapat mengimplementasikan KTR dengan pemahaman akan kebijakan tersebut,

Kedua yaitu terkait kecukupan dana dalam implementasi kebijakan. Dana yang diterima oleh UPTD Terminal Penggaron dalam mengimplementasikan kebijakan tidak ada sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan.

2. Karakteristik Badan Pelaksana

Pertama, rentang kendali yang sempit sehingga pengawasan dan pemantauan dapat dengan mudah dilakukan. UPTD Terminal Penggaron dapat langsung menemui supir dan kernet di Terminal. Setelah itu supir dan kernet dapat langsung

mengawasi penumpang sehari-hari di angkutan umum.

Kedua yaitu mengenai keterbukaan informasi dan kebebasan komunikasi sangat kecil. UPTD Terminal Penggaron belum diberitahukan pelaksanaan teknis KTR sesuai Perwal No 29 Tahun 2014. Masyarakat tidak bebas berkomunikasi dengan UPTD Terminal Penggaron terkait pelanggaran dalam pelaksanaan KTR sehingga aspirasi masyarakat tidak dapat ditampung. Hal tersebut akan menghambat implementasi KTR.

3. Komunikasi antar Organisasi dan Pelaksanaan kegiatan

Pertama, terkait kejelasan dan keseragaman informasi yang diberikan kepada supir dan kernet angkutan umum. Informasi mengenai pelaksanaan KTR pada angkutan umum di Terminal Penggaron hanya diterima oleh supir dan kernet yang ikut sosialisasi tahap pertama sehingga tidak semua supir paham akan kebijakan tersebut.

Kedua yaitu koordinasi antar pelaksana kebijakan. Koordinasi hanya dilakukan pada tahun pertama pemberlakuan kebijakan. UPTD

Penggaron, Dinas Kesehatan dan Badan Lingkungan Hidup hanya dilakukan pada sosialisasi pertama dan DISHUBKOMINFO dengan SATPOL PP hanya dilakukan sekali pada inspeksi tahun 2014. Hal ini menyebabkan implementasi tidak berjalan efektif.

4. Sikap Pelaksana

Pertama, pemahaman dari Staff UPTD Terminal Penggaron dan supir akan kebijakan masih kurang sehingga pelaksanaan KTR belum sesuai dengan Perda Kota Semarang No 3 Tahun 2013.

Kedua, komitmen supir dan kernet untuk melaksanakan kebijakan masih kurang terlihat dari pelanggaran yang dilakukan oleh supir dan kernet.

5. Lingkungan Sosial dan Ekonomi

Tingkat ekonomi yang rendah berdampak pada pendidikan yang kurang dari masyarakat menyebabkan pemahaman yang kurang akan kebijakan. Lingkungan sosial yang apatis juga menyebabkan masyarakat membiarkan adanya pelanggaran.

C. Upaya-Upaya yang Perlu Dilakukan dalam Rangka Implementasi KTR pada

Angkutan Umum di Terminal Penggaron.

Dari faktor penghambat implementasi tersebut dapat dirumuskan upaya yang perlu dilakukan untuk dapat mengefektifkan kebijakan KTR pada angkutan umum yaitu:

- a. Pembagian dana yang jelas dan transparan
- b. Keterbukaan informasi antara DISHUBKOMINFO dan UPTD Terminal Penggaron.
- c. Kebebasan komunikasi antara masyarakat dan DISHUBKOMINFO atau UPTD Terminal Penggaron sehingga dapat menampung aspirasi masyarakat.
- d. Pemberian informasi yang jelas, seragam serta konsisten kepada seluruh supir dan kernet angkutan umum di Terminal Penggaron.
- e. Koordinasi yang jelas dan rutin antara DISHUBKOMINFO, UPTD Terminal Penggaron dan supir angkutan mengenai pelaporan pelaksanaan KTR di

angkutan umum Terminal Penggaron.

- f. Koordinasi yang jelas dan rutin antara DISHUBKOMINFO dan SATPOL PP mengenai inspeksi mendadak terkait pelaksanaan KTR pada angkutan umum di Terminal Penggaron.
- g. Pemberian pemahaman mengenai SOP pelaksanaan KTR pada angkutan umum di Terminal Penggaron kepada UPTD Terminal Penggaron, supir dan kernet angkutan umum.
- h. Menumbuhkan komitmen pelaksana kebijakan dalam melaksanakan KTR pada angkutan umum di Terminal Penggaron.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitan dapat disimpulkan bahwa proses Implementasi Kebijakan KTR pada Angkutan Umum di Terminal Penggaron belum berjalan efektif dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Kebijakan KTR yang dilakukan belum dapat menjangkau semua supir dan kernet angkutan umum sehingga mereka tidak paham akan kebijakan tersebut.
- b. Pemberian stiker tanda KTR dan larangan merokok tidak dilakukan secara menyeluruh kepada supir dan kernet angkutan sehingga tidak semua angkutan umum ditempel dengan stiker tersebut.
- c. Semua staff/pegawai yang ada di UPTD Terminal Penggaron bertanggungjawab melakukan pengawasan kepada supir dan kernet angkutan umum. Setelah itu, supir dan kernet angkutan umum melakukan pengawasan kepada penumpang.
- d. Inspeksi mendadak yang dilakukan oleh DISHUBKOMINFO dan SATPOL PP ke Terminal Penggaron hanya dilakukan sekali pada tahun 2014.
- e. Sebagai pelaksana kebijakan yang mengawasi kebijakan, supir dan kernet tidak melaksanakan tugasnya dan malah ikut melakukan pelanggaran sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan efektif.
- f. Sanksi yang tidak diterapkan secara tegas menyebabkan inplemenatsi tidak berjalan efektif karena tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar sehingga tingkat pelanggaran akan semakin tinggi.
- g. Pelaporan mengenai KTR di angkutan umum Terminal Penggaron belum dilakukan akibat kurangnya informasi yang didapat oleh UPTD Terminal Penggaron terkait Perwal No 29 Tahun 2104 sebagai petunjuk teknis dari Perda Kota Semarang No 3 Tahun 2103.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Dalam implementasi Kawasan Tanpa Rokok pada angkutan umum Terminal Penggaron tersebut ada sejumlah faktor yang dapat menjadi pendukung dan penghambat kinerja implementasinya yaitu sebagai berikut:

A. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

- a. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang cukup memadai dalam penyelenggaraannya, pengawasan dan pemantauan KTR pada angkutan umum.
- b. Rentang kendali yang sempit antar UPTD Terminal Penggaron dan supir sehingga pengawasan dan pemantauan dapat dengan mudah dilakukan.

B. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

- a. Dana untuk melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok pada angkutan umum tidak pernah diberikan kepada UPTD Terminal Penggaron.
- b. Kurang adanya keterbukaan dan kebebasan Komunikasi. UPTD Terminal Penggaron tidak mendapat informasi mengenai Perwal Semarang No 29 tahun 2014 dan penumpang tidak dengan bebas berkomunikasi dengan pelaksana kebijakan terkait pengaduan pelanggaran di KTR.
- c. Informasi yang didapat oleh supir tidak seragam dan tidak

secara menyeluruh sehingga masih banyak supir yang tidak mengerti bagaimana pelaksanaan KTR sesuai Perda Kota Semarang No 3 Tahun 2103.

- d. Kurangnya koordinasi antara UPTD Terminal Penggaron dengan Satpol PP untuk melakukan inspeksi mendadak.
- e. Kurangnya pemahaman dan komitmen dari supir angkutan umum yang terlihat dari pelanggaran yang mereka lakukan.
- f. Tingkat ekonomi masyarakat yang rendah sebanding dengan tingkat pendidikan masyarakat sehingga sulit untuk memahami kebijakan ditambah dengan sikap masyarakat yang apatis menyebabkan ketidakpedulian ketika terjadi pelanggaran.

3. Upaya-Upaya Implementasi Kebijakan

Berdasarkan faktor penghambat yang ditemukan dalam implementasi Kawasan Tanpa Rokok pada angkutan umum di Terminal Penggaron perlu dilakukan upaya-

upaya agar implementasi dapat berjalan dengan efektif. Upaya-upaya tersebut antara lain:

- a. Pembagian dana yang jelas dan transparan.
- b. Keterbukaan informasi antara DISHUBKOMINFO dan UPTD Terminal Penggaron.
- c. Kebebasan komunikasi antara masyarakat dan DISHUBKOMINFO atau UPTD Terminal Penggaron sehingga dapat menampung aspirasi masyarakat.
- d. Pemberian informasi yang jelas, seragam serta konsisten kepada seluruh supir dan kernet angkutan umum di Terminal Penggaron.
- e. Koordinasi yang jelas dan rutin antara DISHUBKOMINFO, UPTD Terminal Penggaron dan supir angkutan mengenai pelaporan pelaksanaan KTR di angkutan umum Terminal Penggaron.
- f. Koordinasi yang jelas dan rutin antara DISHUBKOMINFO dan SATPOL PP mengenai inspeksi mendadak terkait pelaksanaan

KTR pada angkutan umum di Terminal Penggaron.

- g. Pemberian pemahaman mengenai SOP pelaksanaan KTR pada angkutan umum di Terminal Penggaron kepada UPTD Terminal Penggaron, supir dan kernet angkutan umum.
- h. Menumbuhkan komitmen pelaksana kebijakan dalam melaksanakan KTR pada angkutan umum di Terminal Penggaron.

Saran

Untuk dapat mengefektifkan implementasi KTR pada angkutan umum di Terminal Penggaron, peneliti berasumsi memberikan saran. **Pertama** yaitu sosialisasi yang dilakukan bertahap sehingga dapat menjangkau seluruh supir dan kernet angkutan umum. Pemahaman yang baik akan kebijakan akan menghasilkan proses implementasi berjalan sesuai dengan Perda Kota Semarang No 3 Tahun 2103. **Kedua**, memberikan sarana dan media bagi masyarakat untuk dapat melaporkan pelanggaran yang terjadi di KTR dan

yang **ketiga** yaitu transparansi dana dalam pelaksanaan KTR.

DAFTAR PUSTAKA

- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gavamedia
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy*. Surabaya: PMN
- Purwanto dan Sulyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Siagian, Sondang. 2007. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Singarimbun, Masri. 2011. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses (edisi revisi)*. Yogyakarta: Medpress
- Perda Kota Semarang No 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

